

Political Risk Pengaruhnya Keputusan Penanaman Modal Asing di Jawa Timur

Seruni Jiwo Wiranti*

Abstrak

Penelitian ini mengambil studi tentang penanaman modal asing, yaitu political risk yaitu dengan melihat pengaruhnya terhadap masuknya investor asing di Jawa Timur, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah political risk menjadi faktor utama sebagai bahan pertimbangan oleh investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur. Yang kedua adalah upaya pemerintah Jawa Timur dalam meminimalisir political risk. Dan berdasarkan hasil yang saya dapat menunjukkan bahwa political risk berkaitan dengan stabilitas politik dan ekonomi, namun bukan menjadi faktor pertimbangan utama dalam pertimbangan mereka untuk menentukan keputusan.

Kata Kunci : Penanaman Modal Asing, Political Risk

Abstract

This research takes the study of foreign investment, namely political risk is to see its effect on the entry of foreign investors in Java East, by asking the following questions. The first, whether political risk as a major factor considered by investors to invest in East Java. The second is an attempt East Java government to minimize political risk. And based on the results I can show that political risk related to the stability of politics and economics, but not a major consideration factor in their judgment to determine the decision.

Keywords: Foreign Direct Investment, Political Risk

* Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, email: annafischer@y7mail.com

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang bagaimana political risk (resiko politik) menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur. Saat tanda kebangkitan ekonomi setelah krisis yang paling parah di era pasca perang telah muncul, kekhawatiran tentang resiko politik semakin besar. Saat hubungan antara Foreign Direct Investment (FDI) dan resiko politik adalah tidak langsung, para investor berulang kali meranking resiko – resiko politik diantara kekhawatiran – kekhawatiran utama mereka saat bergerak ke luar negeri. Memahami gambaran saat ini dari para investor tentang berbagai resiko dan kesempatan di negara- negara yang sedang berkembang adalah sangat penting untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana industri Political Risk Insurance (PRI) dapat membantu mengurangi kekhawatiran atas resiko – resiko politik. Penurunan ekonomi global, dengan pengangguran pemerintah yang ketat, menciptakan tekanan pada rating pertukaran dan membawa ketegangan politik dan sosial, memperbesar resiko – resiko politik spesifik ditempat tujuan investasi yang peling rentan, tapi tidak mengarah ke penilaian ulang resiko politik di semua pasar yang baru. Misalnya, kekhawatiran bahwa pemerintah dapat tergoda untuk memberikan batasan transfer di negara – negara yang sangat terpengaruh tempat krisis finansial, telah secara pasrah mengurangi likuiditas dan mengarah ke penyebaran yang luas. Dengan peningkatan pengangguran, penurunan pembayaran dan tekanan pada program – program sosial akibat penyusutanpendapatan pemerintah, resiko ketidaktentraman sipil menjadi lebih menonjol di beberapa negara. Tekanan anggaran dan stimulus juga meningkatkan kekhawatiran rentang kemampuan beberapa pemerintah dan kesatuan milik pemerintah dan kesatuan milik negara untuk memenuhi obligasi – obligasi kontraktual mereka dan untuk mempertahankan jaminan kekuasaan mereka.

Bagaimanapun juga, resiko – resiko ini sejauh ini tidak dimaterialkan pada skala yang besar, dan jarang menjadi demikian sebagai akibat dari redanya krisis. (World Bank Group, 2010) Saat para investor perusahaan terlihat optimis tentang prospek investasi,

khususnya di pasar – pasar yang baru, resiko politik tetap menjadi kekhawatiran utama dalam jangka menengah. Kekhawatiran tentang beberapa resiko politik jangka panjang cenderung tetap ada, bahkan jika beberapa resiko yang dihubungkan secara langsung ke krisis telah surut saat ekonomi

global secara bertahap telah bangkit. Pertumbuhan kepentingan kekhawatiran resiko politik, trend yang mendahului serangan krisis global, dapat secara sebagian diartibisikan ke peningkatan bobot – bobot negara berkembang - yang dianggap sebagai tujuan yang lebih beresiko daripada tujuan industri – sebagai penerima investasi asing.

Political Risk Pengaruhnya Keputusan Penanaman Modal Asing di Jawa Timur

Selama beberapa tahun terakhir, kebangkitan nasionalisme sumber di beberapa negara, dan negosiasi ulang kontrak, juga telah ditimbang di berbagai persepsi resiko politik di dalam negara – negara ekstraktif. Serangan teroris telah menggambarkan kemunculan ancaman – ancaman yang baru. Dan saat resiko politik menjadi kekhawatiran utama para investor dari pasar – pasar baru yang utama juga, karena mereka berusaha jauh dari tujuan bisnis yang familiar. Keinginan kuat untuk melakukan investasi dipasar – pasar baru, dengan kepentingan resiko – resiko politik, menunjukkan kebutuhan untuk mengatasi dan mengurangi resiko – resiko ini. Dulu, sebagian besar investor, baik di selatan dan utara, bergantung pada kapasitas manajemen resiko mereka sendiri (meskipun minoritas menilai bahwa kapasitas buruk) dan pad mekanisme pengurangan informal, seperti melibatkan pemerintah host dan komunitas lokal, untuk mengevaluasi dan mengatasi resiko politik. Proporsi yang menggunakan produk – produk manajemen resiko politik kontekstual seperti PRI (*Political Risk Insurance*) saat berinvestasi di pasar – pasar baru adalah relatif kecil. Ini menunjukka bahwa sebagian besar investor melihat resiko politik dalam tujuan investasi utama mereka sebagai sesuatu yang dapat diatasi. Bagaimanapun juga, proporsi yang lebih jauh lebih besar dari investor yang mencari PRI saat berusaha memasuki pasar – pasar yang dianggap paling beresiko, menunjukkan bahwa PRI mempunyai peranan yang signifikan untuk melindungi para investor dalam transaksi yang ada diluar kapasitas manajemen resiko internal mereka sendiri. Berbagai survey juga menunjukkan bahwa kepentingan investor dalam PRI, dengan 40 persen responden ada dalam survey global, menunjukkan bahwa mereka akan menganggap ini telah maju. Hasil dari beberapa penelitian yang ada banyak menjelaskan mengenai

faktor – faktor yang mempengaruhi penanaman modal ,dan meneliti mengenai dampaknya. Namun, yang menjadikan penelitian ini menjadi menarik adalah masih sangat terbatasnya informasi mengenai political risk itu sendiri di Indonesia. Yang mana akhirnya

mendorong saya untuk mengangkat topik ini sebagai wacana yang baru untuk sebuah penelitian. Melihat bahwa sangat pentingnya political risk sebagai faktor utama pertimbangan dalam menentukan keputusan bagi investor asing.

Studi Masood A Badri (2007) menggunakan survei ke industri di 23 negara dan mendukung untuk memberikan instrumen yang valid dalam membantu studi dan dukungan untuk keputusan lokasi industri. Studi ini menghasilkan suatu instrumen untuk mengidentifikasi kumpulan 14 faktor kritis atas lokasi industri yang telah dikembangkan dan disintesaka dari literatur. Faktor kritis yang tersebut antara lain faktor transportasi, tenaga kerja, *raw materials*, pasar, kawasan industri, ketersediaan *utilitas*, kondisi pemerintah, struktur pajak, iklim, dan masyarakat serta situasi politik, kompetisi global, regulasi pemerintah dan faktor-faktor ekonomi.

Studi Fuad Erdal & Ekrem Tatoglu (2002) menjelaskan determinasi yang berhubungan dengan lokasi atas FDI dengan pendekatan analisis *time series* atas faktor lokasi utama yang mempengaruhi atas tingkat aliran FDI untuk periode tahun 1980-1998 di Turki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penjelas yang signifikan berpengaruh positif terhadap variabel dependen FDI adalah ukuran *market domestic*, perdagangan luar negeri, infrastruktur dan daya tarik domestik. Ketidakstabilan nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan, ketidakstabilan ekonomi tidak signifikan. Studi Khasanah & Kurniawan (2005) secara khusus menganalisis faktor faktor penentu investasi asing langsung dalam memilih lokasi industri manufaktur di tingkat kabupaten/kota di Pulau Jawa. Faktor-faktor penentu tersebut adalah faktor tenaga kerja, faktor pasar, faktor efek aglomerasi, infrastruktur, waktu dan *Heterogenitas regional*. Dalam penelitian ini terlihat bahwa variabel yang

berpengaruh Secara signifikan terhadap pemilihan lokasi FDI adalah variabel *dummy* metropolitan, perpajakan, dana kredit domestik, dan *market size* serta faktor ketersediaan tenaga kerja. Namun faktor yang berhubungan dengan pasar menjadi faktor utama bagi FDI untuk menentukan lokasinya (*market seeker*).

Walaupun satu atau dua tahun setelah krisis ekonomi 1998, ekonomi Indonesia sudah kembali menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, namun hingga saat ini pertumbuhannya rata-rata per tahun relatif masih lambat dibandingkan negara-negara tetangga yang juga terkena krisis seperti Korea Selatan dan Thailand, atau masih jauh

lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata per tahun yang pernah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru (ORBA), khususnya pada periode 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Salah satu penyebabnya adalah masih belum intensifnya kegiatan investasi, termasuk arus investasi dari luar terutama dalam bentuk penanaman modal asing (PMA). Padahal era ORBA membuktikan bahwa investasi, khususnya PMA, merupakan faktor pendorong yang sangat krusial bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Terutama melihat kenyataan bahwa sumber perkembangan teknologi, perubahan struktural, diversifikasi produk, dan pertumbuhan ekspor di Indonesia selama ORBA sebagian besar karena kehadiran PMA di Indonesia.

ISI

Banyak sekali faktor-faktor yang sebagian besar saling terkait satu sama lainnya dengan pola yang sangat kompleks yang menyebabkan lambatnya pemulihan investasi di Indonesia hingga saat ini. Faktor-faktor tersebut mulai dari yang sering disebut di media masa yakni masalah keamanan, tidak adanya kepastian hukum, dan kondisi infrastruktur yang buruk, hingga kondisi perburuhan yang semakin buruk. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Lebih konkritnya lagi, iklim usaha atau investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin di satu sisi, dan bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin, di sisi lain (Stern, 2002). Sebagai contoh, beberapa studi menunjukkan bahwa di China dan India, sebagai hasil dari perbaikan-perbaikan iklim investasi pada dekade 80-an dan 90-an yang menurunkan biaya dan risiko investasi sangat drastis, maka investasi swasta sebagai bagian dari produk domestik bruto (PDB) meningkat hampir 200 persen.

Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik-tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good gover-*

nance termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak. (Tulus Tambunan, 2006)

Di dalam suatu laporan Bank Dunia mengenai iklim investasi (World Bank, 2005), diantara faktor-faktor tersebut, stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi merupakan empat faktor terpenting. Walaupun sedikit berbeda dalam peringkat kendala investasi antar negara, hasil survei Bank Dunia tersebut didukung oleh hasil survei tahunan mengenai daya saing negara yang dilakukan oleh *The World Economic Forum* (WEF) yang hasilnya ditunjukkan di dalam laporan tahunannya, *The Global Competitiveness Report*. Seperti yang dapat dilihat di Gambar 2, berdasarkan persentase dari responden, ternyata tiga faktor penghambat bisnis yang mendapatkan peringkat paling atas adalah berturut-turut birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang buruk, dan regulasi perpajakan. Maka dari itu Political risk menjadi perhatian utama bagi perusahaan investor asing – dari negara industri dan negara berkembang- ketika akan merambah ke pasar negara berkembang. Pada saat yang sama, investor menjaga pandangan positif pada ekonomi dan prospek usaha di negara berkembang, yang diharapkan dapat menarik pertumbuhan investasi langsung secara global karena perekonomian telah pulih. Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga internasional, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya FDI ke suatu negara yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat meningkatkan minat investor di dalam menanamkan FDI. Peningkatan Produk Domestik Bruto menunjukkan adanya peningkatan ukuran pasar sehingga negara-negara yang mengalami peningkatan di dalam GDP dapat menjadi wilayah yang menjadi basis di dalam melakukan penjualan. Beberapa negara di Asia Timur dan Tenggara menunjukkan trend yang positif antara FDI dan GDP, negara tersebut antara lain : China dan Singapura.

2. Resiko Politik

Resiko politik berhubungan dengan potensi masuknya FDI di dalam beberapa negara, resiko politik ini berhubungan dengan potensi ketidakpastian. Sehingga potensi ketidakpastian ini

dapat mengurangi turunnya FDI di suatu negara.

3. Variabel-variabel makroekonomi lainnya

Selain GDP dan resiko politik, terdapat beberapa variabel makroekonomi lainnya yang menjadi determinan masuknya FDI ke suatu negara. Diantaranya adalah institusi atau tahapan-tahapan yang harus dilalui di dalam menanamkan investasi di suatu negara. Stabilitas makroekonomi, kesehatan dan pendidikan juga merupakan faktor yang menentukan masuknya FDI.

Kenaikan aliran modal masuk FDI masih relatif terbatas. Sebagai bentuk aliran modal yang bersifat jangka panjang dan relatif tidak rentan terhadap gejolak perekonomian, aliran masuk FDI sangat diharapkan untuk membantu mendorong pertumbuhan investasi yang *sustainable* di Indonesia. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan penting dalam mendorong minat investor asing untuk menanamkan modal dalam bentuk FDI di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Namun naik turunnya tingkat penanaman modal yang masuk sampai saat ini tidak hanya dilihat dari faktor perkembangan ekonomi saja, namun juga melihat dari sisi resiko yang ada di negara tujuan. Karena semakin tinggi resiko semakin tinggi nilai return nya. Dan semakin rendah nilai resiko yang ada, maka akan semakin rendah pula nilai eturn yang dihadapi oleh para investor.

Terutama bagi investor yang akan menanamkan modalnya ke negara – negara berkembang, banyak faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum akhirnya memutuskan untuk menanamkan modalnya. Ada beberapa resiko yang harus dihadapi apabila menanamkan modal di negara tujuan ,salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan secara mendalam adalah *political risk* (resiko politik) . Terdapat pola hubungan yang positif antara resiko politik di Indonesia dan tingkat investasi yang masuk. Adanya perubahan kondisi stabilitas politik tahun 1998 menunjukkan adanya penurunan investasi di Indonesia. Akan tetapi seiring dengan perbaikan kondisi di Indonesia, investasi ke dalam negeri semakin meningkat. Peningkatan investasi di Indonesia sebagai akibat perbaikan perekonomian dan stabilitas di Indonesia juga ditunjukkan oleh peningkatan *Global Competitiveness Index* selama 3 tahun terakhir. Index ini merupakan salah satu acuan para investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara. (Determinan FDI, 2007)

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami peningkatan ranking *competitiveness*

index dibandingkan dengan beberapa negara Asia lainnya. Menurut perhitungan Global Competitiveness Index, peningkatan ranking yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh perbaikan di beberapa faktor, seperti dapat dilihat dari tabel yang menunjukkan *competitiveness index*, yaitu meliputi : stabilitas makroekonomi dan efisiensi di dalam pasar. Akan tetapi, peningkatan investasi ini belum maksimal, terutama apabila dibandingkan dengan negara lainnya terutama di Asia, Indonesia masih merupakan negara dengan tingkat pendorong investasi asing yang rendah, bahkan masih berada di bawah beberapa negara Asia Tenggara, terutama di bidang infrastruktur, seperti : Singapura, Korea, Malaysia, Thailand, India. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha-usaha yang mendorong peningkatan investasi ke Indonesia. Investasi yang dilakukan di Indonesia belum mencapai tingkat optimal ditunjukkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Tingkat pengembalian investasi yang tercermin dari trend *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang mengalami penurunan. Penurunan ICOR ini menunjukkan adanya indikasi produktifitas kapital yang mengalami penurunan.
2. Rata-rata prosentase realisasi PMA terhadap permohonan yang diajukan hanya berkisar 50 % sejak tahun 1990an. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar rencana proyek asing yang sudah mendapat izin dari pemerintah tidak jadi dilaksanakan.
3. Dari sisi ketersediaan infrastruktur, Indonesia boleh dikatakan masih terbelakang dibandingkan beberapa negara tetangga.
4. Produktifitas tenaga kerja pada periode setelah krisis menunjukkan penurunan, dan masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.
5. Pembangunan sumber daya manusia belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan negara tetangga yang ditunjukkan dengan pengeluaran pendidikan terhadap total pengeluaran pemerintah.
6. Tingginya risiko baik di tingkat makro maupun tingkat mikro.
7. Menurut survei yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan dari sisi jumlah prosedur, waktu dan biaya untuk memulai usaha, proses memulai

usaha di Indonesia termasuk yang mempunyai hambatan besar dibandingkan dengan negara lain.

Sementara itu, dari sisi *governance*, tingkat korupsi Indonesia masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal tersebut merupakan penyebab *micro risk* dalam melakukan aktifitas ekonomi di Indonesia masih tinggi.

Risiko politik dan ketidakstabilan politik menurut green, berkorelasi terbalik dengan tingkat modernisasi dan adaptasi dari sistem politik, semakin dikembangkan dan semakin canggih kelembagaan sistem politik, semakin rendah risiko dan semakin rendah prospek ketidakstabilan politik dalam hal perubahssan struktural yang mendadak. Risiko politik meningkat apabila, sistem politik lebih primitif, negara kurang adaptif, atau negara lebih rentan untuk dipengaruhi oleh kepentingan sekitar. Lebih penting lagi, tingkat risiko politik diasumsikan berkorelasi positif terhadap stres yang diakibatkan oleh percepatan modernisasi ekonomi, dimana sistem politik dapat merambah ke titik krisis tertinggi saat berhadapan dengan tuntutan kompleks yang disebabkan oleh perkembangan yang cepat, dislokasi sosial, dan munculnya isu-isu yang tidak memiliki kapasitas kelembagaan untuk mengatasi : tingkat harapan, keadilan distribusi dan kemuncualn konstituen baru yang kuat.

Bagi Green, penyajian tadi menyarankan strategi investasi untuk menghindari berbagai risiko politik. Pertama, mengidentifikasi sistem jenis negara mana yang jatuh, maka strategi yang digunakan atau didesain yang mencerminkan profil risiko politik negara tersebut. Dengan demikian, dalam kasus kediktatoran militer dimana legitimasinya rendah, penggunaan kekerasan dimana mana, dan tiba-tiba perubahan rezim atau kepopulerannya meningkat, menghindari investasi jangka panjang, menggunakan kendaraan investasi jangka pendek, meminimalkan biasanya hangus, upaya untuk menahan investasi dalam bentuk cair dan aset gampang untuk ditarik. Sebaliknya, masyarakat yang muncul yang jatuh dalam apa yang Green sebut sebagai sistem instrumental dan kuasi-instrumental berjanji minimalnya risiko politik, mengundang investasi jangka panjang, dan mampu mendukung lebih tinggi biaya yang tak tergantikan dengan paparan infrastruktur (prtambangan, produksi) dengan risiko politik yang rendah. Tak disangka, sistem adaptif berperan menampilkan tingkat terendah risiko politik dan tingkat tertinggi

stabilitas politik, mampu menyerap investasi jangka panjang , sunk cost yang tinggi, dan

eksposur investasi berganda dengan risiko politik yang relatif rendah.

PENUTUP

Dalam melakukan investasi asing, para investor memiliki pertimbangan sendiri. Pertimbangan itu terarah kepada berbagai faktor di negaranegara tempat tujuan investasi. Faktor industri yang akan dimasuki merupakan pertimbangan para investor. Investor harus memutuskan akan menanamkan modalnya di sebuah bidang industri. Namun demikian, sebelum memasuki taraf industri, investor terlebih dahulu memutuskan di negara mana ia akan menanamkan modalnya. Hal tersebut berkaitan dengan globalisasi, di mana investor harus dapat bersaing dalam industri yang ia pilih. Lebih lanjut lagi, persaingan tersebut dapat dimenangkan jika investor telah secara tepat memutuskan menanamkan modalnya di negara yang mendukung usaha industrinya. Secara garis besar, faktor biaya dan manfaat merupakan dua hal yang menjadi pokok pertimbangan. Investor asing tentu menginginkan adanya efisiensi dalam investasinya dengan keuntungan yang optimal di negara asing. Investor tertarik untuk menanamkan modalnya di suatu negara yang memiliki kestabilan politik, karena hal tersebut akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan usaha dari investor tersebut. Memburuknya iklim investasi pada umumnya terjadi karena meningkatnya country risk dan belum mantapnya kondisi sosial politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arus modal.

Salah satu motif investor asing yang terkait dengan penelitian ini adalah mencari keamanan politik. Investor asing cenderung menanamkan modalnya di negara dengan keadaan politik pemerintahan yang stabil. Jika investor merasa keadaan pemerintahan dapat mempengaruhi bisnis mereka, investor asing akan berpindah ke negara lain yang memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, dimana hal ini tercermin pada keadaan politiknya. Secara umum, indikator untuk setiap variabel berhubungan dengan faktor biaya dan keuntungan, sehubungan dengan pertimbangan investor asing untuk memilih suatu negara. Hubungan di antara indikator setiap variabel dan tingkat PMA masuk adalah sebagai berikut:

Voice and Accountability

- Keterjangkauan informasi kantor publik

suatu negara oleh para investor asing.

- Transparansi pemerintahan dalam memberitahu perubahan kebijakan dalam negeri yang berkenaan dengan investasi asing yang akan masuk.
- Dialog di antara pemerintah dengan para investor asing. Political Stability and Absence of Violence
- Kondisi keamanan negara yang mungkin dapat mengganggu operasional usaha asing.
- Tingkat terorisme di suatu negara yang dapat mengancam kinerja investasi asing.

Government Effectiveness

- Penundaan di dalam birokrasi pemerintahan lokal terhadap proses investasi, di mana investor asing tentu harus menunggu lebih lama jika prosedur berbelitbelit.
- Banyaknya waktu dan biaya dalam mengadakan persetujuan antara pemerintahan lokal dan investor asing. Regulatory Quality
- Kebijakan mengenai biaya umum apa saja yang harus dikeluarkan oleh para investor asing.
- Kebijakan mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh investor asing sehubungan dengan tenaga kerja lokal.

Rule of Law

- Tingkat kualitas lembaga hukum dalam menangani masalah masalah yang berkaitan dengan usaha dan perekonomian

Control of Corruption

- Kuantitas pemerintah di berbagai tingkatan (misalnya di bagian perpajakan) yang terlibat dalam proses korupsi ketika investasi asing masuk.
- Kuantitas dan frekuensi investor asing yang harus membayar sejumlah uang tertentu demi kelancaran proses investasinya.

Selain faktor yang berkenaan dengan biaya dan keuntungan, investor juga mempertimbangkan motif lain dalam melakukan penanaman modal di negara asing, antara lain:

1. mencari pasar, untuk memperoleh tambahan pendapatan dengan memasok barang produksinya ke pasar yang baru
2. mencari bahan baku, di mana pertimbangan ini berkaitan dengan sumber daya alam yang akan diolah lebih lanjut
3. mencari efisiensi produksi atau pengurangan biaya (*cost reduction*), di mana investor menanamkan modal di negara yang memiliki harga faktor produksi lebih murah sehingga hasil olahannya dapat dijual dengan harga kompetitif, baik di dalam negeri itu mau pun untuk diekspor
4. mencari keunggulan pengetahuan atau *knowl-*

edge seeking, dengan melakukan penanaman modal di negaranegara yang maju dalam suatu bidang usaha serupa guna memperoleh ilmu dan pengalaman dalam bisnis bersangkutan

5. skala ekonomis atau *economic of scale*, di mana investor berusaha mengembangkan keunggulan kompetitif di berbagai bagian manajemen (produksi, pemasaran, keuangan, penelitian dan pengembangan, distribusi, dan pembelian) untuk menghasilkan produk guna dijual di pasar yang baru
6. mempertahankan konsumen yang ada (*keeping domestic customer*), yaitu ketika satu pihak memutuskan berinvestasi di negara yang merupakan tempat para konsumennya berada.
7. *multiple sourcing*, di mana investor asing harus siap mematuhi peraturan-peraturan di lebih dari satu negara. Hal yang menjadi pertimbangan para investor adalah jumlah biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan perlakuan kebijakan di negaranegara tempat berinvestasi
8. mencari keamanan politik (Sartono, 2001; Shapiro, 2003).

Salah satu motif investor asing yang terkait dengan penelitian ini adalah mencari keamanan politik. Investor asing cenderung menanamkan modalnya di negara dengan keadaan politik pemerintahan yang stabil. Jika investor merasa keadaan pemerintahan dapat mempengaruhi bisnis mereka, investor asing akan berpindah ke negara lain yang memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, di mana hal ini tercermin pada keadaan politiknya.

Jadi, kestabilan perekonomian merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan bukan saja untuk menjaga kestabilan negara, namun juga untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun kita tidak bisa hanya melihat dari sisi itu saja, karena keadaan di setiap negara atau wilayah tidaklah sama, kita tidak bisa menyamakan pertimbangan investor dengan negara berkembang, karena memang jelas sangat berbeda, dari segi sistem dan pelaksanaan atau operasionalnya berbeda dengan negara berkembang. Investor asing akan tertarik untuk menanamkan modalnya di suatu negara yang memiliki situasi yang kondusif, karena dengan adanya situasi tersebut maka usaha yang dijalankan oleh investor asing di suatu negara dapat terkendali dan terprediksi dengan baik. Jadi seperti yang kita pahami bahwa resiko politik dilihat sebagai alat untuk memahami situasi yang ada di mana faktor-faktor politik dan sosial dapat mempengaruhi kemampuan negara dan kesediaan untuk menghormati kewajiban

keuangannya.

Upaya Pemerintah Jawa Timur Dalam Meminimalisir Political Risk Menjaga Iklim Investasi Political Risk Pengaruhnya Keputusan Penanaman Modal Asing di Jawa Timur

Dengan menjaga iklim investasi, secara tidak langsung investor akan bisa dengan sendirinya melihat bagaimana keadaan investasi di wilayah kita. Maka dari itu, dengan melihat perkembangan realisasi investasi yang sejauh ini telah terlaksana di Jawa Timur Pemprov bersama dengan Pemkot terus berusaha untuk mengupayakan meningkatkan iklim investasi dengan cara menjaga iklim investasi. Seperti yang dikatakan oleh Gubernur kita pada akhir tahun lalu:

“Dengan perkembangan realisasi investasi yang luar biasa tersebut, Pemprov bersama Pemkab/Pemkot se Jawa Timur, akan terus berupaya meningkatkan kinerja investasi, utamanya investasi PMA dan PMDN. Upaya itu dilakukan, dengan memperbaiki iklim investasi yang berdaya saing melalui peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) yang mudah, cepat, dan transparan, memperbaiki infrastruktur, memfasilitasi penyediaan lahan dan tenaga kerja yang handal, juga gencar melakukan upaya peningkatan kegiatan promosipromosi, baik di luar negeri maupun dalam negeri.”

Karena seperti yang kita ketahui bahwa selama ini yang banyak dikeluhkan oleh para investor adalah masalah kelancaran dalam mengurus perizinan, dimana proses yang lama kerap kali terjadi.

Menjaga Kestabilan Faktor Makroekonomi

Faktor dimana pemerintah termasuk menjaga agar tidak melonjaknya resiko politik atau meminimalisir resiko politik adalah faktor makro ekonomi, di mana pemerintah pun memiliki peran dalam menciptakan kondisi makroekonomi yang kondusif guna menarik perhatian para investor asing (Parjiono, 2007). Makroekonomi di suatu negara berhubungan dengan tingkat PMA yang masuk. Banyak variabel yang termasuk di dalam masalah makroekonomi. Faktor faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkat PMA yang masuk. Faktor dalam makroekonomi suatu negara merupakan salah satu analisis bagi para investor asing, yaitu termasuk di dalam analisis negara (*country analysis*). Iklim investasi di sebuah negara merupakan bahan pertimbangan para investor asing, di mana di dalamnya mencakup segala kebijakan yang menyangkut keadaan makroekonomi negara itu, seperti tingkat

pertumbuhan ekonomi, masalah ketenagakerjaan, bahkan keadaan sosial dan politik negara itu (Solnik dan McLeavey, 2009). Seperti yang dikatakan oleh salah satu investor dari Jepang, Daiwa Technical Press Co., pada salah satu media online:

“Kami tidak melihat kestabilan Politik, namun lebih pada kemudahan pengurusan perizinan, baik sebagai PMA murni maupun sebagai Joint Venture dan harus ada transparansi. Dan juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan serta pelabuhan dan jaminan pasokan energi, baik gas maupun listrik”.

Karena sampai saat ini investor juga tetap melihat kondisi lingkungan di Jawa Timur yang masih memerlukan banyak perbaikan terutama dari segi infrastruktur yang masih belum memadai. Dan mereka juga membutuhkan jaminan pasokan energi yang masih belum terjamin. Faktorfaktor di dalam makroekonomi tersebut adalah sebagai berikut:

Pengangguran

Menyediakan kesempatan kerja yang sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia merupakan tanggung jawab penting suatu perekonomian. Dalam perkembangannya, semakin banyaknya perusahaan swasta semakin mendorong perkembangan kesempatan kerja. Namun demikian, pemerintah tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan kerja warga negaranya (Sukirno, 2000). Sehubungan dengan tingkat PMA yang masuk, hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan tenaga kerja lokal dalam bidang manajerial dan penggunaan teknologi yang akan dibawa serta oleh para investor asing (Parjiono, 2007). Jika tenaga kerja dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan para investor asing, tingkat PMA yang masuk ke negara bersangkutan akan membaik. Hal lain yang menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini adalah biaya tenaga kerja, di mana investor asing akan mempertimbangkan besarnya biaya tenaga kerja yang harus mereka keluarkan dibandingkan dengan hasil investasi mereka (Agiomirgianakis et al, 2006).

Inflasi

Inflasi merupakan keadaan di mana harga-harga meningkat secara umum di sebuah negara. Penyebab inflasi bukan hanya berasal dari penawaran uang yang berlebihan tetapi didorong oleh faktor lain, seperti kenaikan gaji, ketidakstabilan politik, pengaruh inflasi luar negeri, dan kemerosotan nilai mata uang (Sukirno, 2000). Inflasi yang tinggi menunjukkan ketidakstabilan makroekonomi di suatu negara. Hal ini merupakan

faktor penghambat masuknya PMA, karena para investor asing enggan menanamkan modal di negara dengan ongkos produksi yang tinggi (Rezafimahefa dan Hamori, 2005).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang. Di setiap periode suatu masyarakat akan menambah kemampuan dan faktor produksi lainnya untuk memproduksi barang dan jasa. Namun demikian, tidak semua negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan kemampuan memproduksi yang dimiliki oleh faktor produksi yang semakin meningkat (Sukirno, 2000). Dengan kebijakan pemerintah yang tepat, diharapkan faktor produktivitas total meningkat sehingga keadaan makroekonomi menjadi stabil. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat disoroti melalui siklus bisnis dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang di negara bersangkutan. Pertumbuhan jangka panjang tersebut tercermin dari tingkat GDP (Gross Domestic Product) negara itu, di mana tingkat GDP yang tinggi mendorong investasi asing yang masuk lebih banyak lagi (Rezafimahefa dan Hamori, 2005; Solnik dan McLeavey, 2009).

Kurs Valuta Asing (Valas)

Persoalan akan timbul ketika negara tidak dapat menjadi kestabilan kurs valasnya. Hal ini terjadi ketika terdapat impor yang berlebihan. Karena impor yang berlebihan tersebut, mata uang domestik menjadi turun sehingga harga barang impor tersebut menjadi mahal dan mempercepat inflasi. Nilai mata uang yang merosot dan keadaan yang tidak pasti tersebut mengurangi gairah penanam modal asing untuk berinvestasi sehingga hal ini akan memperlambat ekspansi ekonomi di masa depan (Sukirno, 2002; Rezafimahefa dan Hamori, 2005).

Hasilnya menggambarkan bahwa risiko politik tergantung pada perilaku strategis multinasional sebagai mitra dan perusahaan tuan rumah memiliki interaksi strategis dengan pemerintah setempat.

KESIMPULAN

Yang pertama, jadi memang political risk adalah termasuk hal yang sangat perlu diperhatikan melihat Jawa Timur, atau lebih luasnya Indonesia adalah negara berkembang yang segala sistemnya masih belum cukup dewasa bila dibandingkan dengan negara-negara maju atau bahkan negara-negara tetangga yang selangkah lebih maju. Namun, political risk tidak menjadi hal yang utama dalam

pertimbangan investor asing untuk menanamkan modalnya. Hal ini terbukti dengan masih menjadi nomor satunya pertimbangan secara ekonomi yaitu yang bersifat efisien dan efektif. Yang mana itu berarti bahwa political risk tidak menjadi hal yang primer untuk dipertimbangkan bagi investor asing dalam pemikirannya untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniati, Yati, Prasmuko Andry, Yanifitri. 2007. *Determinant FDI: Faktor-faktor yang menentukan Investasi Asing Langsung*. Bank Indonesia.
- Jarvis, Darryl S.L. 2008. *Conceptualizing, Analyzing and Measurement Political Risk: The Evolution of Theory and Methode*. National University of Singapore.
- World Bank Group. 2010. *World Investment and Political Risk*. MIGA.
- Moosa, Imad A. 2002. *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice*. Palgrave: New York.
- Moran, Theodore H, Gerald T. West. 2008. *International Political Risk Management: Needs of The Present, Challenges For The Future*. The World Bank Group: New York.
- Moran, Theodore .2001. *International Political Risk Management: Exploring New Frontiers*. The World Bank Group: New York.
- Nainggolan Amos Alogo " Analisa Pengaruh Peristiwa Politik Terhadap Integrasi Pasar." M.Si., Universitas Diponegoro. 2010.
- Dooley, Michael P, Peter Isard. " *Capital Controls, Political Risk, and Deviation from Interest-Rate Parity*". The Journal of Political Economy, Volume 88, 370-384.
- White, Colin, Miao Fan. *Risk and Foreign Direct Investment*. Plagrave.

Internet

- <http://bpm.jatimprov.go.id/>
- <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/>
- <http://repository.usu.ac.id>
- <http://www.bi.go.id/>
- <http://www.bisnis.com/articles/>
- <http://www.bppk.depkeu.go.id/>
- <http://www.duke.edu>
- <http://www.onepetro.org/>
- <http://www.pwc.com/>
- <http://www.scribd.com/>
- <http://www.cgi.cnn.com>